

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- _____. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hadjon, Philipus, M. *Pengantar Hukum perizinan*, Di kutip dari N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge. Surabaya: Yuridika, 1994.
- Hadjon, Philipus, M., et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Negara (Introduction to the Indonesia Administration Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Pers, 2011.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Nurjaya, I Nyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Antropologi Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.
- Pramula, Beni. *Ironi Negeri Kepulauan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Salim HS, H. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- _____. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saragih, Bintan R. *Percikan Pemikiran Hukum, Ketatanegaraan, dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W, et.al., *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia Antara yang Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2011.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Trihayati. *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Wiradipraja, E.Saefullah. *Penuntun Praktis Metode penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media, 2015.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Ke-4 atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan ke-dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang pelaksanaan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1967(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141).

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

JURNAL, MAKALAH, DAN PENELITIAN

Asril. *“Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar”* , Jurnal kewirausahaan Vol. 13 , No. 1 Januari – Juni 2014.

Azis, Noor Muhammad. *“ Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – undangan”* , Jurnal RechtVinding Vol. 1, No.1 April 2012.

Direktorat Jenderal Minerba dan Batubara. *“Menata IUP Membenahi Industri Minerba”* . Edisi XV, April 2013.

Fakultas Hukum Universitas pelita Harapan. *“Pedoman Penulisan Laporan Tugas Akhir, Sidang Tugas akhir, Syarat Kelulusan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum”* 2015.

Gultom, Petrus. A. *“Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pemerintah Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana di Bidang pertambangan”* , Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya 2009.

Pigome, Martha. *“Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah”* , Vol. 40, No. 2 2012.

Risalah Sidang Rancangan Undang – Undang Tentang Pemerintahan Daerah, 12 April 2012.